

Mulyadi Ragu Perbaikan Jalan Tol Bocimi Tuntas di Akhir Tahun

CIBINONG (IM)- Anggota Komisi V DPR-RI, Mulyadi meragukan perbaikan Jalan Tol Bocimi yang mengalami bencana tanah longsor pada 3 April lalu tuntas oleh PT. Waskita Toll Road di akhir Tahun 2024.

Hal itu karena, PT. Waskita Toll Road dan Juga Dirtjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) masih melayangkan dua opsi perbaikan jalan tol tersebut.

“Dua opsi perbaikan Jalan Tol Bocimi belum diputuskan oleh mereka, saya pun meragukan jika perbaikan jalan tersebut bisa tuntas di akhir Tahun 2024,” kata Mulyadi kepada wartawan, Selasa (28/5).

Mulyadi menuturkannya pada tinjauannya ke lokasi pada akhir pekan lalu, dirinya pun kaget akan progres perbaikan Jalan Tol Bocimi di Km 64+600 Desa Purwasari, Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

“Saya kira ketika peninjauan berbicara kapan

target perbaikan Jalan Tol Bocimi bisa tuntas, ternyata masih berbicara opsi atau cara perbaikannya,” tuturnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun meminta keselamatan pengguna Jalan Tol Bocimi menjadi prioritas PT. Waskita Toll Road dan juga PT. Trans Jabar Tol selaku pengelolanya.

“Mereka yang diberikan kewenangan mengelola Jalan Tol Bocimi harus memastikan keamanan pengguna jalannya, oleh karena itu saya ingatkan bahwa perbaikannya tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat guna hingga tidak terulang lagi kejadiannya,” pintanya.

Dari informasi yang dihimpun, akibat bencana tanah longsor di Jalan Tol Bocimi tersebut. Pengoperasian jalan tol tersebut hanya satu jalur baik yang arah ke Jakarta maupun Sukabumi dilakukan secara bergantian. **gio**

Hadapi Paceklik, 7.000 Ton Beras Disiapkan di Gudang Bulog Bogor

BOGOR (IM)- Badan Urusan Logistik (Bulog) Dramaga, Kabupaten Bogor menyiapkan 7.000 ton beras menghadapi musim paceklik atau krisis pangan musim kemarau 2024 mendatang.

Kepala Cabang Bulog Dramaga Bogor, Yanto Nurdianto mengatakan, ribuan ton beras ini disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan pada musim kemarau tahun 2024 ini.

“Tetap, kami (Bulog) cabang Bogor ini punya perencanaan stok kebutuhan, itu yang sudah disampaikan setiap bulannya rutin,” kata Yanto, Selasa (28/5).

Dalam satu bulan, kata Yanto, Bulog Dramaga mengalokasikan tujuh ribu beras untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Menurut Yanto, 7.000 ton beras ini dibagi menjadi dua bagian, di antaranya 5.700 ton untuk bantuan pangan dan 1.300 ton lainnya digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) masyarakat.

“Jadi jangan khawatir masyarakat Bogor, blok Bogor tidak akan kekurangan stok (beras),” katanya.

Lebih lanjut, Bulog pun memastikan, beras SPHP tetap laris di pasaran meski mengalami kenaikan harga eceran tertinggi (HET) dari Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram.

“Selalu habis walaupun sekarang ada kenaikan harga ya. Dari yang HET-nya tadi Rp10.900 sekarang menjadi senilai Rp12.500,” pungkasnya. **gio**

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bogor Sudah Baik



Pj.Sekda Kabupaten Bogor menyatakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor sudah baik.

CIBINONG (IM)- Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menyebut kesiapan manajemen penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Bogor sudah baik.

Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah se-Jawa Barat terkait peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat.

Rakor diselenggarakan di Harper Hotel, Purwakarta, Senin (27/5). Rakor dipimpin Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman dan diikuti jajaran Sekda dan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Jawa Barat.

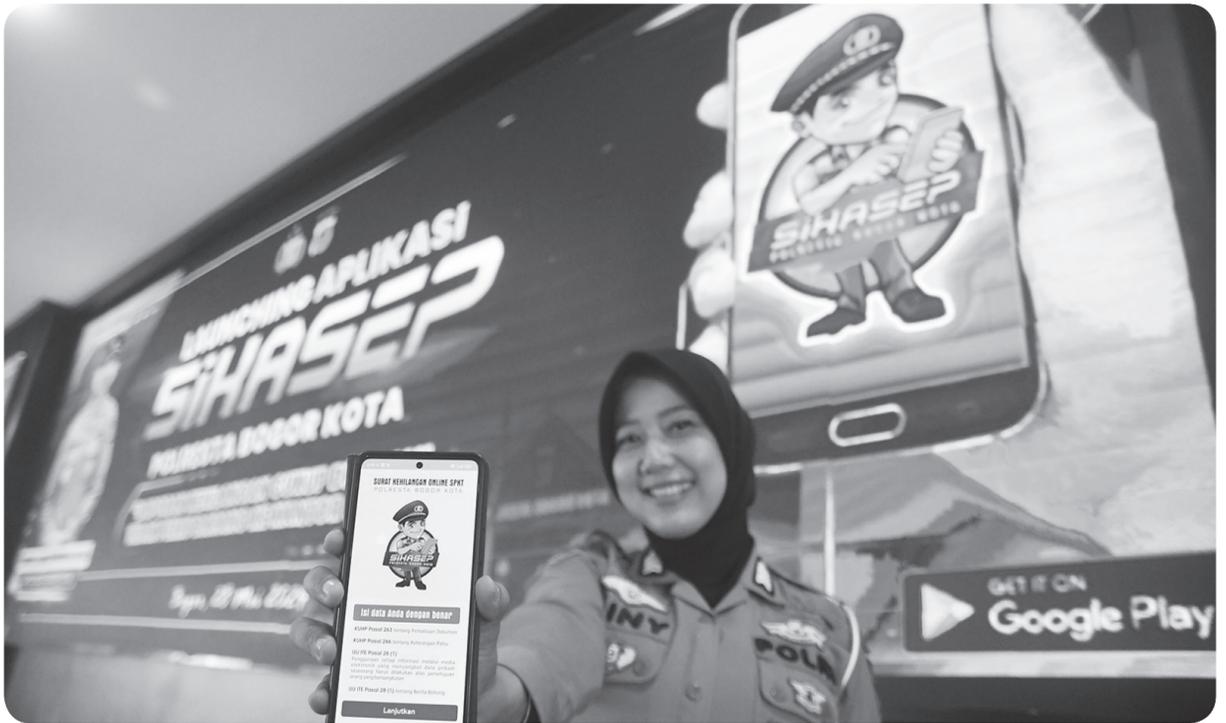
BPBD Provinsi Jawa Barat menyebut kesiapan manajemen penanggulan-

gan bencana di Kabupaten Bogor sudah baik.

Pj. Sekda Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor telah melakukan kajian risiko bencana, kemudian juga menyusun penanganan bencana, dengan kajian penanganan bencana dan kajian-kajian lainnya.

“2024 kita sudah lakukan review dan kita akan melakukan penyusunan kajian penanganan dan mitigasi bencana untuk 2024 sampai 2029. Itu diharapkan bulan September 2024 ini selesai. Dengan tahapan-tahapan yang dilakukan, berarti kita sudah mempersiapkan, sudah merencanakan bagaimana menghadapi dan menanggapi apa bila terjadi bencana,” jelas Pj. Sekda. **gio**

8 | Nusantara



PELUNCURAN APLIKASI SIKASEP POLRESTA BOGOR KOTA

Anggota Polwan menunjukkan aplikasi SiKasep pada gawai saat peluncuran di Aula Gedung Parama Satwika, Polresta Bogor Kota, Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jabar, Selasa (28/5). Aplikasi SiKasep Polresta Bogor Kota merupakan aplikasi laporan kehilangan nontindak pidana tertentu model C atau Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK) secara daring yang dapat memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor Polisi.

Bukit di Garut Terbelah, Tiga Kampung Terancam Longsor

Menurut warga setempat, pergerakan tanah mulai terjadi sejak awal Maret 2024. Fenomena pergerakan tanah tersebut mengakibatkan sekitar enam rumah hancur. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Garut yang akan merelokasi warga.

GARUT (IM)- Sebuah bukit tampak terbelah akibat adanya pergerakan tanah. Kondisi mengerikan ini terjadi di Kampung Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Ka-

bupaten Garut, Jawa Barat. Akibatnya tanah di bukit persis di kaki Gunung Besar ini mengancam tiga kampung yang berada di bentangan bukit tersebut.

Menurut warga setempat, pergerakan tanah mulai terjadi sejak awal Maret 2024. Fenomena pergerakan tanah tersebut mengakibatkan sekitar enam rumah hancur.

“Di lokasi ini sebelumnya ada dua rumah roboh akibat pergerakan tanah ini,” ungkap Puloh (55), salah seorang warga di Kampung Tengah RT 5 RW 7, Desa Sukamulya, Selasa (28/5).

Penuturan Puloh, dirinya beserta keluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudara yang berada di Kampung

Cipeundeuy, Desa Sukamulya. Menurutnya, keluarga terpaksa diungsikan karena khawatir bukit yang ditinggalinya akan terjadi longsor, khususnya di saat cuaca hujan.

Ketua RT setempat, Maska mengatakan, bentangan retakan tanah yang terjadi di wilayahnya sepanjang 480 meteran dengan kedalaman sudah mencapai 12 meter lebih. Menurut Maska, sebanyak 48 rumah dan lahan seluas 57 hektar yang terancam terdampak dari bencana ini mengungsi ke rumah sanak saudara di kampung lain.

“Rumah yang hancur sudah enam rusak berat

dan dua rumah rusak sedang. Warga kebanyakan sangat ketakutan karena karena khawatir bukit berpotensi longsor sampai ke daratan di bawah dekat sungai,” ujar Maska.

Maska menyampaikan, hingga saat ini belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Garut yang akan merelokasi warga.

Diketahui, pergerakan tanah masih kerap terjadi hingga saat ini, terutama di waktu hujan. Warga sekitar sangat khawatir dan lebih memilih beraktivitas sekaligus mengontrol kondisi kampungnya saat cuaca cerah di siang hari. **pra**

Pemkab Bogor Pastikan Masyarakat Tak Mampu Dapat Jaminan Jamkesda

CIBINONG (IM)- Guna memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jelang peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghadihi masyarakat kurang mampu jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Disebutkan hal itu tertuang dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor : 400.7/254/Kpts/Per UU/2024 tentang optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024, yang diterbitkan pada 22 Mei 2024 kemarin.

Sebagai informasi diterbitkannya SK UHC, agar pada masa transisi UHC masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirawat di Rumah Sakit dapat dibiayai oleh Jamkesda meskipun masih dalam proses pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, dengan

diterbitkannya SK UHC maka kini masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS dapat memperoleh Jamkesda.

UHC diterbitkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, dan kini masyarakat kurang mampu terjamin kesehatannya melalui Jamkesda,” ungkap Asmawa Tosepu.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengungkapkan, berdasarkan pembahasan bersama tim percepatan UHC, diupayakan Juni 2024 mendatang UHC persentase kepesertaan JKN bisa mencapai di atas 95 persen dan tingkat keaktifan di atas 75 persen.

“Sehingga bisa ditingkatkan dari SK UHC menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang UHC yang ditargetkan terbit pada akhir 2024 nanti,” terang Agus Fauzi.

Dirinya juga berharap dengan adanya SK UHC ini dapat mengakomodir masyarakat tidak mampu yang

sedang dalam proses pendaftaran DTKS untuk pengajuan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masa transisi UHC.

“Semoga bantuan ini dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan. Sehingga mereka dapat pelayanan kesehatan yang paripurna,” imbuh Agus Fauzi.

Perlu diketahui, berkaitan dengan proses Pendaftaran Kepesertaan JKN sebelum dan setelah UHC yakni, pada masa sebelum UHC, pendaftaran JKN segmen PBPB BP yang didaftarkan oleh Pemda menggunakan perbup nomor 60 Tahun 2023.

Sementara, pada masa setelah UHC, Pendaftaran JKN PBPB BP Pemda adalah Satu hari aktif. Tata cara dan alur pendaftaran selanjutnya akan dituangkan dalam petunjuk teknis. Alur dan pendaftaran JKN di luar segmen PBPB dan BP Pemda tidak berubah, mengikuti ketentuan yang berlaku. **gio**

Perairan Pulau Belitung Ditetapkan Sebagai Kawasan Zero Tambang Timah

PANGKALPINANG (IM)- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pemerintah menetapkan Perairan Pulau Belitung sebagai kawasan zero atau bebas dari tambang timah, karena memiliki keindahan eksotik dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Negeri Laskar Pelangi itu.

“Pemerintah telah menetapkan Perairan Pulau Belitung sebagai kawasan pariwisata yang zero tambang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel, Agus Suryadi di Pangkalpinang, Selasa (28/5).

Ia menyatakan selama ini keindahan perairan dan terumbu karang di Pulau Belitung sudah menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal, nasional, dan internasional untuk berwisata di Negeri Laskar Pelangi itu.

“Selama ini keindahan Pulau Belitung telah mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga laut di Belitung ini ditetapkan sebagai kawasan bebas penambangan bijih timah,” ujarnya.

Ia menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan dua lokasi di perairan Pulau Belitung

sebagai kawasan konservasi untuk pengembangan ekonomi biru untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di daerah itu.

Dua kawasan konservasi di Pulau Belitung yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Perairan Mendanau hingga Membalong di Kabupaten Belitung dan Perairan Memporang Kabupaten Belitung Timur.

“Zona konservasi ini sudah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas dasar usulan Pemprov Kepulauan Babel, untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dari kerusakan dan pencemaran dampak penambangan,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Kepulauan Babel, Flores Fherado mengatakan lokasi kawasan konservasi dengan jenis konservasi taman wisata perairan di Pulau Belitung meliputi Pulau Selema, Pulau Kalambau, Pulau Bangkai, Pulau Pelema, dan Pulau Tupai.

“Pada pulau-pulau tersebut kondisi terumbu karang masih relatif baik dan pada zona inti kawasan yang dicadangkan, difokuskan pada target konservasi yaitu terumbu karang, penyus, kerang kima, dan ikan napoleon,” katanya. **pra**



Melalui UHC, Pemkab Bogor memastikan masyarakat tak mampu mendapat jaminan Jamkesda.